

# ***HISTORY OF RIAU-LINGGA CULTURE IN THE TIME OF THE SULTAN MAHMUD RIAYATSYAH GOVERNMENT 1777-1812***

***Nuzu Chairu Akbar \* Drs. H. Ridwan Melay, M. Hum. \*\*, Bunari, M. Si \*\*\****

*Email: nuzu493@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari@lecture.unri.ac.id*

*CP: 081364958718*

*Historical Education Study Program  
Department of Social Sciences Education  
Faculty of Teacher Training and Education  
Riau University*

***Abstrak:*** *The Riau-Lingga Sultanate is a Malay-patterned kingdom that is under the Malay Peninsula. The Riau-Lingga Sultanate was the successor of the Malacca Sultanate which became the beginning of the founding of Malay Empire with the famous sultan, Sultan Mahmud Riayatsyah who ruled from 1777-1812. Sultan Mahmud Riayatsyah's government began in 1777. The purpose of this study was (1) To know the government of the Riau-Lingga Sultanate during the leadership of Sultan Mahmud Riayatsyah (2) To know out the social, political and economic conditions of the Riau-Lingga Sultanate during the reign of Sultan Mahmud Riayatsyah (3) to know the business carried out by Sultan Mahmud Riayatsyah in strengthening the position of the sultanate during his reign in the Sultanate of Riau-Lingga (4) to know the distribution of power at the end of Sultan Mahmud Riayatsyah's administration. This research uses historical methods. The results of this study are that the reign of Sultan Mahmud Riayatsyah was the starting point for the development of the cities of Tanjungpinang and Daik Lingga as a bustling city. Defense cooperation with outside parties is well established in strengthening its position. Advanced economic development through trade, gambier plantations and tin mining at that time. Islam developed rapidly at that time with the establishment of the Sultan Lingga Mosque in Daik Lingga. The period of his administration was assisted by royal officials who served as advisors to the sultan.*

***Key Words:*** *History, Kingdom*

# SEJARAH KESULTANAN RIAU-LINGGA PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN MAHMUD RIAYATSYAH 1777-1812

Nuzu Chairu Akbar \* Drs. H. Ridwan Melay, M. Hum. \*\*, Bunari, M. Si \*\*\*

Email: nuzu493@gmail.com, ridwanmelay@yahoo.com, bunari@lecture.unri.ac.id

CP: 081364958718

Program Studi Pendidikan Sejarah  
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Riau

**Abstrak:** Kesultanan Riau-Lingga adalah kerajaan yang bercorak melayu yang ada di bawah Semenanjung Malaya. Kesultanan Riau-Lingga merupakan penerus dari Kesultanan Malaka yang menjadi awal mula berdirinya Kemaharajaan Melayu dengan sultan yang terkenal yaitu Sultan Mahmud Riayatsyah yang memerintah dari tahun 1777-1812. Pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah dimulai pada tahun 1777. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Riayatsyah (2) Untuk mengetahui keadaan sosial, politik dan ekonomi Kesultanan Riau-Lingga pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah (3) untuk mengetahui usaha yang dilakukan Sultan Mahmud Riayatsyah dalam menguatkan kedudukan kesultanan pada masa kekuasaannya di Kesultanan Riau-Lingga (4) untuk mengetahui pembagian kekuasaan pada akhir pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah Masa pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah ini merupakan titik awal berkembangnya kota Tanjungpinang dan Daik Lingga sebagai sebuah kota yang ramai penduduknya. Kerjasama pertahanan dengan pihak luar kerajaan terjalin dengan baik dalam menguatkan kedudukannya. Perkembangan ekonomi yang maju melalui bidang perdagangan, perkebunan gambir dan pertambangan timah pada saat itu. Agama Islam berkembang pesat pada saat itu dengan didirikannya Masjid Sultan Lingga di Daik Lingga. Masa pemeritahannya dibantu oleh pembesar-pembesar kerajaan yang bertugas sebagai penasehat sultan.

**Kata Kunci:** Sejarah, Kerajaan

## PENDAHULUAN

Jika masa Kesultanan Malaka mengenal yang namanya Sultan Mahmud Syah I, Kesultanan Johor terkenal yang namanya Sultan Alauddin Riayat Syah II maka Kesultanan Riau-Lingga Punya Sultan terkenal yaitu Sultan Mahmud Riayat Syah. Dimasa pemerintahan Sultan Mahmud Riayat Syah ini Kesultanan Riau-Lingga mendapatkan ancaman dari pengaruh kolonialisme Belanda dan Inggris yang Mulai masuk ke dalam wilayah kekuasaan kesultanan Riau-Lingga, akan tetapi Sultan Mahmud Riayat Syah tidak berdiam saja menikmati jabatannya sebagai sultan melainkan ia melakukan perlawanan terhadap kekuatan yang ingin menghancurkan kedaulatan Kesultanan Riau-Lingga tersebut. Sultan Mahmud Riayat Syah memerintah dari tahun 1777-1812 di Kesultanan Riau-Lingga<sup>1</sup>.

## METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu kerja untuk memahami objek penelitian yang sistematis dan intensif dari pelaksanaan penelitian, guna memperoleh kebenaran optimal. Untuk mendapatkan data penelitian tentang Kesultanan Riau-Lingga pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Riayat Syah 1777-1812, digunakan metode penelitian history (sejarah).

“Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis kesaksian sejarah guna menemukan yang autentik dan dapat dipercaya, serta usaha sintesis atas data semacam itu menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya”<sup>2</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, nyatalah setiap menulis sejarah sangat diperlukan metode sejarah sebagai pedoman. Hal ini sesuai dengan tujuan metode sejarah untuk membuat rekonstruksi, meneliti, mengevaluasi serta menjelaskan bukti-bukti untuk menetapkan fakta untuk mencapai kesimpulan yang dipertanggungjawabkan. Selain metode sejarah, penulis juga menggunakan metode komperatif, deksriptif, dan analisis sebagaimana dikemukakan oleh Winarno Surakhmand:

Mengumpulkan metode komperatif, diskriptif, analisis data yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut yakni dengan menggambarkan, membandingkan, meneliti dan mengetahui secara jelas lagi dan faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki<sup>3</sup>.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data sebagai berikut: Teknik observasi, Teknik studi pustaka dan Teknik wawancara.

menggunakan metode analisis data yang diketahui berdasarkan beberapa langkah-langkah menurut Louis Gottchalk sebagai berikut:

- 1) Pemilihan subjek yang diteliti.

---

<sup>1</sup> Haji Buyong Adil. 1971. *Sejarah Johor*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia. Hlm 24

<sup>2</sup> Louis gottschalk. 1983. *Mengerti sejarah*. UI Jakarta. hlm.32

<sup>3</sup> Winarno Surakhmad. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito. hlm 16

- 2) Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk subjek tersebut.
- 3) Mengkaji sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sah tidaknya sumber tersebut.
- 4) Pemilihan unsur-unsur yang dapat dipercaya pada sumber-sumber yang terbukti kebenarannya.

## **KESULTANAN RIAU-LINGGA**

Wilayah pusat kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga terletak di Kota Tanjungpinang dan Kota Daik Lingga yang sekarang menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau. Pada masa Kesultanan Riau-Lingga berkuas, pusat pemerintahan terbagi menjadi dua yaitu periode pertama 1761-1787 di Hulu Riau, Tanjungpinang dan kemudian selama 25 tahun berlanjut di Lingga dari tahun 1787 -1812. Kesultanan Riau-Lingga ini mempunyai wilayah yang sangat luas, dalam perkembangannya Kesultanan Riau-Lingga sendiri dipimpin oleh Sultan Mahmud Riayatsyah dimulai tahun 1777-1812 pasca meninggalnya Daeng Kamboja sebagai orang yang menjalankan pemerintahan sementara. Kesultanan Riau-Lingga menerapkan semacam kepemimpinan politik di daerah semenanjung Malaysia, Riau dan Kalimantan Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Riayatsyah**

Kesultanan Riau-Lingga merupakan salah satu kerajaan yang menjadi penerus dari Kemaharajaan Melayu yang ada di Semenanjung Malaya. Kesultanan ini merupakan penerus dari Kesultanan Johor yang pernah berdiri di sana, dan jauh sebelum itu berdiri juga Kesultanan Malaka sebagai cikal bakal Kemaharajaan Melayu.

Dahulu sekitar tahun 1761, kesultanan ini pernah dipimpin oleh sultan yang tangguh dan bijaksana dalam kepemimpinannya yaitu Sultan Mahmud Riayatsyah merupakan gelar dari Sultan Mahmud ibni Sultan Abdul Jalil Muadzam Syah, merupakan keturunan bendahara yang menjadi bangsawan di kesultanan Melayu pusat pemerintahan kerajaan awalnya berada di Hulu Riau di Pulau Bintan sampai 1786. Setahun berikutnya, tepatnya tahun 1787, sultan memindahkan pusat kerajaannya ke Daik di Pulau Lingga (Kabupaten Lingga sekarang). Pemindahan ini dilakukan sebagai strategi sultan untuk menghadapi dan melawan tekanan intensif dari Belanda yang ingin menguasai kerajaan. Sejak itulah terkenal sebutan dari yang awalnya Kerajaan Riau-Johor atau Johor-Riau menjadi Kerajaan Riau-Lingga. Di tempat barunya ini Sultan memerintah sampai beliau wafat pada tahun 1812. Mengenai pengangkatan sultan ini dapat dijelaskan pula melalui kutipan berikut.

“Selepas kemangkatan Sultan Ahmad, dinasti bendahara berlanjutan dengan pelantikan Raja Mahmud sebagai sultan dengan gelaran Sultan Mahmud Syah III. Sultan Mahmud adalah adinda Sultan Ahmad dan kenaikannya ke atas takhta

adalah atas usaha suku Bugis yang diketuai oleh YDPM Daeng Kamboja. Setelah kemangkatan Sultan Ahmad, telah berlaku pertikaian di antara pembesar-pembesar Melayu terutama Bendahar Tun Hassan dan Temenggung Abdul Jamal yang ingin melantik saudar-saudara kepada marhum Raja di Baroh yaitu Tengku Abdul kadir, Tengku Osman dan Tengku Buang dengan pembesar-pembesar Bugis. Akhirnya pada tahun 1761 bersamaan 1175 H, Raja Mahmud dilantik setelah pembesar Bugis bersikeras.”<sup>4</sup>

Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga sendiri awal mulanya dijalankan oleh Daeng Kamboja selaku Yang Dipertuan Muda mengingat usia Sultan Mahmud Riayatsyah yang masih kecil. Segala Pemerintahan Kesultanan dipegang oleh Daeng Kamboja. Selama itu pula, Sultan Mahmud Riayatsyah diasuh oleh Daeng Kamboja dan Tengku Hitam sampai pemerintahan dikembalikan lagi ke Sultan Mahmud Riayatsyah pada tahun 1777 pasca mangkatnya Daeng Kamboja. Dalam pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga sendiri pemerintahan kerajaan tidak hanya diperintah oleh Sultan saja melainkan dibantu oleh beberapa pembesar kerajaan yaitu Yang Dipertuan Muda, Datuk Bendahara, Temenggung, Raja Tua dan Raja Indra Bungsu.

### **1. Struktur Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah.**

Struktur pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah di Kesultanan Riau-Lingga terdapat pula beberapa jabatan pembesar kerajaan dalam membantu tugas Sultan Mahmud Riayatsyah. Untuk mengetahui lebih lengkapnya akan diuraikan sebagai berikut:

#### a) Yang Dipertuan Muda

Merupakan jabatan kedua tertinggi dalam pemerintahan, jabatan ini di duduki oleh keturunan Bugis. Peranan Yang Dipertuan Muda adalah sebagai Kepala pemerintahan kerajaan yang mengurus masalah pemerintahan kerajaan.

#### b) Datuk Bendahara

Merupakan jabatan yang bertugas mewakili sultan untuk wilayah Pahang dan sekitarnya. Bendahara sendiri berpean sebagai penjaga adat mengangkat sultan yang baru sekaligus penasehat sultan.

#### c) Temenggung

Merupakan jabatan yang mewakili pemerintahan Sultan untuk wilayah Johor dan sekitarnya. Dalam Tuhfat Al Nafis, peranan Temenggung juga digambarkan sebagai Panglima angkatan perang kerajaan.

---

<sup>4</sup>Mardian Nurdin 2008. *Politik Kerajaan Johor 1718-1862*. Kuala Lumpur: Yayasan warisan Johor. hlm 26

d) Raja Indra Bungsu

Pembesar kerajaan yang mempunyai kedudukan dalam pemerintahan kerajaan sebagai pengganti jabatan Penghulu Bendahara yang bertugas sebagai wakil Datuk Bendahara. Raja Indra Bungsu pernah ikut menandatangani perjanjian mengaku kalah kepada Belanda.

e) Raja Tua

Pembesar kerajaan dari Pihak Bugis yang muncul bersamaan dengan kedudukan Yang Dipertuan Muda. Jabatan ini berperan sebagai Pemimpin Angkatan Perang dari pihak Bugis.

**B. Kehidupan Sosial, Ekonomi dan Politik Kesultanan Riau-Lingga pada masa Sultan Mahmud Riayatsyah**

**1. Kehidupan Sosial**

Kehidupan sosial kesultanan dalam pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah dapat dikatakan berkaitan erat dengan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan dalam menghidupkan bidang sosial yaitu dengan membangun Lingga menjadi sebuah kota lengkap dengan istana dan kota paritnya. Hubungan tersebut dapat digambarkan seperti ini perdagangan Kesultanan Riau-Lingga dengan bangsa lain tidak hanya memperkuat perekonomian bagi kerajaan tetapi juga menghasilkan keragaman budaya

Kesultanan Riau-Lingga juga memperhatikan yang namanya pendidikan bagi masyarakatnya, agama kerajaan pada saat itu menganut agama Islam, oleh karena masyarakatnya diajarkan tentang pendidikan berbasis Islam, bahkan melibatkan ulama Arab yang berdagang di wilayah kesultanan. Pendidikan yang diajarkan itu seperti mengaji Al-Qur'an, penulisan Arab Melayu dan tulisan huruf Hijaiyah, penulisan Arab Melayu ini masih dikenal khususnya di wilayah kerajaan pada saat itu. Masjid-masjid dibangun agar digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah melainkan sebagai tempat pendidikan.<sup>5</sup>

**2. Kehidupan politik**

Kehidupan Politik pada masa Kesultanan Riau-Lingga pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah tidak terlepas dari yang namanya kemampuan berpolitik yang dimiliki oleh sultan sebagai pemimpin. Beliau juga mampu mengharmoniskan kerajaan dari pertikaian internal. Jiwa kepemimpinannya bisa mempersatukan pihak-pihak yang bertikai sehingga mereka menjadi fokus melaksanakan pembangunan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Konflik yang paling sering terjadi adalah konflik antara pihak Melayu dan Bugis. Dengan mengutamakan persatuan, Sultan berhasil meredakan konflik-konflik yang berujung pada pelemahan kerajaan. Sejarah mencatat,

---

<sup>5</sup>Abdul Malik dkk. 2017. *Sultan Mahmud Riayatsyah: Pahlawan Besar Gerilya laut*. PT. komodo books. Hlm. 45

selama kepemimpinan Sultan tak pernah terjadi konflik besar yang menguras tenaga dan korban jiwa, sebagai mana terjadi di kerajaan lain.

Konflik politik sering terjadi dalam pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga dibawah kekuasaan Sultan Mahmud Riayatsyah, hal ini disebabkan oleh adanya perjanjian suku Bugis-Melayu yang diibaratkan mata kanan (Melayu) dan mata kiri (Bugis). Dalam kedudukannya sebagai yang dipertuan muda kekuasaan bugis begitu besar, mereka menguasai angkatan perang, hubungan dengan pihak luar dan perdagangan yang diatur oleh puak Melayu. Sedangkan kedudukan orang melayu yang hanya sebagai pemegang tradisi dan adat istiadat serta pemerintahan di dalam negeri.<sup>6</sup>

### **3. Kehidupan Ekonomi Kesultanan Riau-Lingga**

Kehidupan ekonomi Kesultanan Riau-Lingga sendiri mulai mendapatkan ancaman serius dari pihak luar. Secara geografis Kesultanan Riau-Lingga yang menjadi jalur strategis perdagangan dunia perlahan mendapat ancaman dari Pemerintah Belanda yang mempunyai naluri besar untuk menguasai tempat-tempat atau kawasan-kawasan strategis atau bandar perdagangan dunia. Riau pada saat itu boleh dikatakan sangat ramai orang yang datang untuk berdagang di situ. Hal itu dapat dikutip dari tulisan Tuhfat al-Nafis yang menyebutkan,

Shahadan kata sahibu'l-hikayat pada masa inilah negeri Riau itu ramai serta ma'amornya, dan segala dagang pun banyaklah datang dari negeri Jawa, dan kapal dari Benggala membawa apium dan lain-lain dagangan, dan segala perahu dagang di kuala Riau pun penohlah daripada kapal, dan kici dan selob, dan santi, dan wangkan, dan tob Siam. Dan apalagi di dalam sungai Riau; segala perahu-perahu rantau berchucok ikatlah bersambong dan berpendarat, Maka tatkala itu banyaklah orang-orang negeri kaya-kaya, kelengkapan perang banyak yang sedia.<sup>7</sup>

Kesultanan Riau-Lingga dibawah kekuasaan Sultan Mahmud Riayatsyah telah mencoba untuk membangun Kehidupan Ekonomi kerajaan melalui pembukaan timah sebagai cara baru untuk mendapatkan kemakmuran bagi Kesultanan Riau-Lingga. Jika dahulu hanya berfokus pada perkebunan Gambir dan perdagangan sahaja, maka semenjak pindah di Lingga mencari usaha baru dalam meningkatkan perekonomian kerajaan melalui usaha pertambangan Timah.

#### **C. Usaha Sultan Mahmud Riayatsyah dalam menguatkan kedudukan Kesultanan pada masa kekuasannya di Kesultanan Riau-Lingga**

Dalam kehidupan pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah terdapat beberapa usaha dalam menguatkan kesultanan. Selama ia memerintah, pada saat itulah terdapat ancaman bagi kedaulatan kerajaan. Hubungan pemerintahannya dengan Belanda selalu diwarnai pertikaian dan pertentangan. Walaupun berat perjuangan yang dilakukannya melawan pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, hal itu tak mengendurkan semangat sultan untuk terus berjuang.

---

<sup>6</sup>Rida K Liamsi. 2016. *Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu 1160-1946*. PT. Sagang Intermedia pres. Hlm 140

<sup>7</sup> Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Riau. 2002. *Raja Ali Haji: Tuhfat Al-Nafis (Sejarah Riau-Lingga dan daerah taklukannya 1699-1864)*. Tanjungpinang: Yayasan khazanah Melayu. hlm 175

Sultan pun mulai mengatur strategi menghadapi Belanda. Beliau menyadari tak mungkin secara frontal melawan Belanda yang punya kekuatan armada lengkap di Selat Melaka. Oleh sebab itu, secara rahasia beliau mengirim utusan ke Tempasuk (Kalimantan). Tujuannya adalah membujuk agar Raja Tempasuk, pimpinan lanun yang terkenal ketika itu, menyerang Belanda di Tanjungpinang. Sultan juga berangkat ke Pahang menemui Bendahara Tun Abdul Majid. Di sana Sultan menitahkan Bendahara untuk menyerang Belanda di Malaka melalui Pahang.

Usaha yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Riayatsyah mendapatkan hasil berupa pengakuan kedaulatan Kesultanan Riau-Lingga. Akhirnya, peperangan melawan Belanda berakhir pada 29 Mei 1795, surat Gubernur Jenderal kepada Sultan Mahmud Riayatsyah, tertulis bahwa surat penyerahan Riau oleh VOC Belanda kepada Sultan Mahmud Riayatsyah sebagai Yang Dipertuan Besar Kesultanan Riau-Lingga yang ditanda tangani oleh perwakilan gubernur VOC yaitu Abraham Couperus dan Henry Newcome dan A. Brown sebagai perwakilan dari angkatan perang Kerajaan Inggris. Surat pengakuan kembali Sultan Mahmud Riayatsyah sebagai Sultan dari Kesultanan Riau-Lingga itu ditulis sendiri oleh Abraham Couperus sebagai perwakilan Gubernur VOC di Malaka dan Henry Newcome sebagai perwakilan Inggris. dapat diketahui pula bahwa pada saat itu dikatakan bahwa Kesultanan Riau-Lingga telah diakui kedaulatannya<sup>8</sup>.

Namun pasca pengakuan tersebut tidak serta menjadikan Kesultanan Riau-Lingga sebagai kerajaan yang tidak mempunyai kekuatan melainkan menjadi patokan akan sebuah pemerintahan kerajaan yang berdaulat yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan hubungan dengan pihak asing. Sementara itu di bidang pertahanan Sultan Mahmud Riayatsyah telah membangun berbagai benteng sebagai upaya bertahan dari serangan Belanda yang ingin merusak kedaulatan kerajaan. Pertahanan yang dibangun tersebut berupa benteng-benteng yang tersebar di Pulau Lingga dan Pulau Mepar. Benteng yang dibangun tersebut adalah Benteng Bukit Cening, Benteng Kuala Daik, dan Benteng Pulau Mepar.

Benteng Bukit Cening merupakan tempat pertahanan yang dibuat pasca pemindahan ke Daik Lingga. Tujuan pembangunannya adalah untuk melindungi pusat pemerintahan kerajaan yang berada di kota Daik, sebagai tempat pertahanan benteng ini memiliki posisi yang strategis dan berada di puncak bukit. Sedangkan Benteng Kuala Daik merupakan benteng pertahanan yang terletak terluar sebelum masuk ke sungai Daik atau berada tepat di kuala sungai. Benteng terakhir yaitu benteng Pulau Mepar, merupakan benteng terdepan untuk memasuki Pulau Lingga. Benteng-benteng tersebut terhubung satu sama lain sebagai suatu system pertahanan pada saat itu.

#### **D. Pembagian Kekuasaan pada Akhir Pemerintahan Kesultanan Riau-Lingga pada Masa Pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah**

Pada akhir pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah, kekuasaan para petinggi kerajaan mengalami konflik. Peristiwa perebutan kedudukan sebagai Yang Dipertuan Muda yang menjadi awal mulanya. Pada saat itu pembagian kekuasaan kepada Raja Ali sebagai Yang Dipertuan Muda dilakukan, Raja Ali diberi kedudukan di Pulau Bayan. Dari Pulau Bayan inilah, Raja Ali melakukan penataan ulang kawasan pelabuhan riau

---

<sup>8</sup> E. Netscher. 2002. *De Nederlanders In Djohor En Siak 1602 tot 1865*. Terjemahan Wan Ghalib hlm 395

menjadi ramai kembali sehingga para pendatang dari luar berdatangan datang ke situ baik dari pedagang Arab, India dan Cina. Sedangkan Sultan Mahmud Riayatsyah sebagai Yang Dipertuan Besar Kesultanan Riau-Lingga tetap berada di Daik Lingga sampai habis hayatnya.

Setelah mangkatnya yang dipertuan muda Raja Ali, beliau digantikan oleh Raja Jakfar sebagai yang dipertuan muda VI berkedudukan di Kota Rentang Penyengat. Pada tahun 1806, baginda sultan juga melantik Temenggung Abdul Rahman yang bergelar Temenggung Sri Maharaja sebagai pengganti Engku Muda Muhammad yang berkedudukan di pulau Bulang. Dengan demikian, hierarki birokrasi pemerintahan kemaharajaan Melayu pada masa itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Yang Dipertuan Besar yang dijabat Sultan Mahmud Riayatsyah yang memerintah Kesultanan Riau-Lingga beserta taklukannya berkedudukan di Daik Lingga
2. Yang Dipertuan Muda Raja Jakfar sebagai wakil sultan berkedudukan di Pulau Penyengat.
3. Temenggung Abdul Rahman yang memerintah Johor dan Singapura berkedudukan di Pulau Bulang.
4. Bendahara Sri Wak Raja yang memerintah Pahang beserta kawasan sekitarnya berkedudukan di Pahang.

Begitulah pembagian kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga pada saat itu, jadi dapat dikatakan bahwa pemerintahan pada saat itu tidak hanya dijalankan oleh sultan sendiri saja melainkan dibantu oleh pemangku-pemangku kekuasaan kesultanan atau orang-orang besar kerajaan pada saat itu.

Setelah Wafatnya Sultan Mahmud Riayatsyah yang mangkat pada 12 Januari 1812 muncul berbagai macam peristiwa yaitu tentang siapa pengganti sultan. Perlu diketahui sultan meninggalkan 2 orang putera dari istri yang berbeda, ia menikah yang pertama dengan Engku Puan yang merupakan anak Bendahara Pahang, kemudian menikah lagi dengan Encik Makoh putri dari Daeng Naturang yang merupakan keturunan Bugis, selanjutnya menikah dengan Encik Mariam yang merupakan anak dari Bandar Hasan dan terakhir menikah dengan Engku Putri Raja Hamidah<sup>9</sup>.

Sultan Mahmud Riayatsyah meninggalkan dua putera yaitu Tengku Husin yang merupakan anak dari Sultan Mahmud Riayatsyah dengan Encik Makoh dan Tengku Abdurahman yang merupakan anak sultan dengan Encik Mariam. Pada saat Sultan Abdurahman Muazamsyah inilah terjadi perbedaan pembagian kekuasaan kesultanan, yang pada pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah hanya dikenal namanya yang dipertuan muda maka pada sultan baru ini ditambahkan lagi yaitu Wakil Yang Dipertuan Muda di Daik Lingga yang berkedudukan sama tempat dengan Sultan.

Hal ini menandakan perbedaan kekuasaan dahulu bahwa hanya sultan yang berkedudukan di Daik Lingga. Kedudukan ini menandakan adanya intervensi yang dilakukan oleh yang dipertuan muda terhadap sultan, Wakil yang dipertuan muda pada saat itu yaitu didudki oleh Zain Al-Kudsi. Pembagian kekuasaan ini juga menyebabkan Kesultanan Riau-Lingga memiliki dua sultan yaitu Sultan Abdurahman

---

<sup>9</sup>Ahmad Dahlan. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia. 2014 hlm 262

Muazamsyah dengan Kerajaan Riau-Lingga nya dan Sultan Husein yang menyingkir dari Lingga menjadi sultan atas wilayah Singapura dan Johor beserta takluknya.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Sejarah Kesultanan Riau-Lingga pada masa Pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah 1777-1812 maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesultanan Riau-Lingga dibawah pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah telah berhasil menjadi kerajaan yang mampu berdaulat. Kesultanan Riau Lingga merupakan penerus dari Kemaharajaan Melayu. Pusat pemerintahan kerajaan dahulunya berada di Hulu Riau dan di Daik Lingga. Dahulu pusat pemerintahan di Hulu Riau baru kemudian pindah ke Lingga. Untuk menjalankan roda pemerintahan di seluruh kerajaannya, raja dibantu oleh para pejabat atau orang besar kerajaan yang secara herarki menduduki fungsi tertentu dalam kekuasaan Kesultanan Riau-Lingga. Kesultanan di bawah kekuasaan Sultan Mahmud Riayatsyah juga berhasil mempertahankan kekuasaan tak hanya dengan cara hubungan dalam negeri melainkan dengan luar.
2. Kehidupan sosial kesultanan dalam pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah dapat dikatakan berkaitan erat dengan perekonomian perdagangan Kesultanan Riau-Lingga dengan bangsa lain tidak hanya memperkuat perekonomian bagi kerajaan tetapi juga menghasilkan keragaman budaya. Kemakmuran ekonomi pada masa itu menciptakan kemakmuran bagi rakyat Kesultanan Riau-Lingga dengan kehidupan ekonomi yang maju Dalam kehidupan masyarakat Kesultanan Riau-Lingga juga tidak semua dalam masyarakatnya bersuku Melayu, namun juga terdiri dari berbagai suku lainnya Setelah perpindahan ke Lingga Kesultanan Riau-Lingga pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Ri'ayatSyah pun kembali dapat melaksanakan sepenuhnya kekuasaan dan kewenangan atau tanggungjawabnya sebagai Yang Dipertuan Besar Kesultanan Riau-Lingga mampu memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat negerinya.
3. Dalam kehidupan pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah terdapat beberapa usaha dalam mempertahankan kerajaan Strategi sultan melawan Belanda telah menjadi catatan emas bagi generasi penerus Kesultanan Melayu pada masa itu dan periode selanjutnya Sultan pun mulai mengatur strategi menghadapi Belanda. Beliau menyadari tak mungkin secara frontal melawan Belanda yang punya kekuatan armada lengkap di Selat Melaka. Sultan memusatkan perhatian utamanya untuk menyerang Belanda di Tanjungpinang dengan memanfaatkan para lanun dari Tempasuk Sejak kepindahan Sultan, daerah Hulu Riau yang pernah menjadi pusat Kerajaan Riau-Lingga telah pula ditinggalkan rakyat Melayu.

4. Pada akhir pemerintahan Sultan Mahmud Riayatsyah, kekuasaan para petinggi kerajaan mengalami konflik Pada saat ini pembagian kekuasaan kepada Raja Ali sebagai yang dipertuan muda dilakukakn Pada saat ini pembagian kekuasaan kepada Raja Ali sebagai yang dipertuan muda dilakukakn, Raja Ali diberi kedudukan di Pulau Bayan Wakil Sultan di Daik Lingga yang berkedudukan sama tempat dengan Sultan. Hal ini menandakan perbedaan kekuasaan Wakil Yang Dipertuan Muda di Daik Lingga yang berkedudukan sama tempat dengan Sultan. Hal ini menandakan perbedaan kekuasaan dahulu bahwa hanya sultan yang berkedudukan di Daik Lingga

## **Rekomendasi**

Kesultanan Riau-Lingga merupakan peninggalan sejarah yang sangat berharga, banyak sekali peninggalan berupa benda dan makam yang menjadi sebuah sumber yang bisa diceritakan sehingga dapat menjadi sebuah kenangan yang berharga bagi bangsa dan negara. Kemudian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau khususnya masyarakat Daik Lingga dan Tanjungpinang hendaknya dapat menjaga situs peninggalan Kesultanan Riau-Lingga dan juga kepada Pemerintah Daerah agar dapat menjaga peninggalan tersebut, seperti situs istana kota piring yang terdapat di lampiran gambar yang boleh dikatakan kurang mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah.

Diharapkan kepada Pemerintah daerah agar lebih memperhatikan ataupun meningkatkan kepeduliannya terhadap peninggalan sejarah seperti bukti sejarah yang ada di Kesultanan Riau-Lingga dan mengekspos tentang Kesultanan Riau-Lingga sebagai suatu pengetahuan melayu dalam dunia Sejarah Melayu Dunia. Sehingga generasi muda yang kebanyakan tidak tahu akan sejarah Kesultanan yang pernah berdiri di tempat mereka berada ini diketahui.

Sultan Mahmud Riayatsyah yang sudah menjadi Pahlawan Nasional pada tahun 2018 tadi hendaknya pula dijadikan sebagai momentum pengenalan tentang pengetahuan akan sejarah Kesultanan yang ia pimpin yaitu Kesultanan Riau-Lingga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Malik dkk. 2017. *Sultan Mahmud Riayatsyah: Pahlawan Besar Gerilya laut*. PT. komodo books.
- Ahmad Dahlan. *Sejarah Melayu*. Jakarta: Kepustakaan populer Gramedia. 2014
- Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Riau. 2002. *Raja Ali Haji: Tuhfat Al-Nafis (Sejarah Riau-Lingga dan daerah taklukannya 1699-1864)*. Tanjungpinang: Yayasan khazanah Melayu
- E. Netscher. 2002. *De Nederlanders In Djohor En Siak 1602 tot 1865*. Terjemahan Wan Ghalib

Haji Buyong Adil. 1971. *Sejarah Johor*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia

Louis gottschalk. 1983. *Mengerti sejarah*. UI Jakarta

Mardian Nurdin 2008. *Politik Kerajaan Johor 1718-1862*. Kuala Lumpur: Yayasan warisan Johor

Rida K Liamsi. 2016. *Prasasti Bukit Siguntang dan Badai Politik di Kemaharajaan Melayu 1160-1946*. PT. Sagang Intermedia pres.

Winarno Surakhmad. (1998). *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsito